

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)
Tahun 2026**

Unit Organisasi : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kaltim

Program	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil
Kegiatan	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut Di Bawah 12 Mil Di Luar Minyak dan Gas Bumi
Output Kegiatan	Terbitnya Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan (3 Dokumen) serta meningkatnya pemahaman masyarakat tentang perizinan berusaha
Tujuan	Mewujudkan kepastian hukum, kejelasan alur proses, dan ketersediaan sumber informasi perizinan berusaha bagi seluruh pelaku usaha guna mencegah praktik yang merugikan lingkungan dan masyarakat lokal
Analisis Situasi	1. Wilayah pesisir Kaltim memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan memberikan jasa lingkungan besar bagi masyarakat, namun menghadapi ancaman eksploitasi berlebihan sehingga memerlukan regulasi perizinan yang ketat melalui KKPRL 2. Masyarakat pesisir terdiri dari laki-laki yang dominan pada aktivitas penangkapan dan perempuan yang dominan pada sektor pengolahan hasil laut serta perdagangan skala kecil 3. Akses terhadap informasi perizinan ruang laut serta pelatihan teknis masih belum merata antara laki-laki dan perempuan. 4. Data pilah gender terkait pelaku usaha yang memahami atau mengajukan izin masih terbatas, sehingga kebijakan seringkali belum menyentuh kebutuhan spesifik perempuan pesisir.
Rencana Aksi	1. Mengumpulkan data peserta sosialisasi perizinan berdasarkan jenis kelamin dan kategori usaha sebagai dasar perencanaan program. 2. Menyediakan media komunikasi (poster, media sosial) yang mudah dijangkau oleh perempuan pesisir dan pelaku usaha kecil . 3. Memastikan keterwakilan perempuan dalam kegiatan sosialisasi perizinan dengan kuota minimal 30–40% .
Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Rp 130.479.760 (Seratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Tuju Puluh Sembilan Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah)
Dampak/ Hasil Output Kegiatan	Meningkatnya kepatuhan dan pemahaman pelaku usaha (laki-laki dan perempuan) terhadap regulasi pemanfaatan ruang laut serta terwujudnya keadilan akses informasi perizinan



Kepala,

H. Irhan Hukmaidy, S.Pi., MP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19751228 200003 1 002

**GENDER ANALYSIS PATHWAY
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026**

Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Issue Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan (Internal)	Sebab Kesenjangan (Eksternal)	Reformasi tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar	Indikator Gender
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Pelaku usaha pesisir terbagi menjadi laki-laki (operasional laut) dan perempuan (pengolahan/perdagangan), namun akses informasi perizinan masih didominasi laki-laki dan belum tersedia data pilah gender peserta sosialisasi tahun sebelumnya	Informasi perizinan belum merata. Partisipasi: * Rendahnya keterlibatan perempuan dalam diskusi teknis perizinan. *Kontrol: * Penilaian teknis izin belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi spesifik usaha yang dikelola perempuan	1. Beban domestik perempuan yang tinggi. 2. Norma sosial terkait mobilitas perempuan. 3. Akses informasi lebih banyak diterima laki-laki	Meningkatkan partisipasi setara antara perempuan dan laki-laki dalam proses serta pemahaman perizinan berusaha sektor kelautan	1. Kuota minimal 30–40% peserta perempuan. 2. Jadwal kegiatan yang ramah bagi perempuan. 3. Pendataan peserta dengan format pilah gender	Jumlah pelaku usaha (laki-laki/perempuan) yang terpapar informasi perizinan tahun sebelumnya belum tersedia secara terpilah	Jumlah pelaku usaha (laki-laki/perempuan) yang terpapar informasi perizinan tahun sebelumnya belum tersedia secara terpilah	Persentas e perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi dan konsultasi perizinan sektor kelautan



Kepala,

H. Irhan Hukmaidty, S.Pi., MP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19751228 200003 1 002